

Skripsi

**FUNGSI HUMAS DALAM PUBLIKASI PADA KANTOR PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diusulkan oleh

HASLIANI. H

Nomor Stambuk : 105640165512



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

Fungsi Humas Dalam Publikasi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Sulawesi Selatan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

HASLIANI. H

Nomor Stambuk : 105640165512

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Fungsi Humas Dalam Publikasi Pada Kantor
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan
Sulawesi
Selatan

Nama Mahasiswa : HASLIANI. H
Nomor Stanbuk : 105640165512
Program Studi : ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan



Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Makassar


Dr. Ezzalilyani. Malik, S.S.os.M.si

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : HASLIANI. H

Nomor Stambuk : 105640165512

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2019

Yang Menyatakan,

HASLIANI. H

Abstrak

HASLIANI. H: 10564 01655 12, Fungsi Humas Dalam Publikasi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sulawesi Selatan. (dibimbing oleh Ansyari Mone /_Amir Muhiddin).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih mendalam tentang fungsi Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)serta Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat dalam menjalankan fungsi sebagai publikasi dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan secara *purposive*. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi social atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian permasalahan yang di teliti yakni Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan), Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, dan staf. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menjalankan aktivitas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi publisitas dalam mewujudkan visi BPKP belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari publisitas yang belum efektif, kurangnya pengenalan masyarakat akan keberadaan BPKP Provinsi Sulawesi serta banyaknya pemberitaan di media massa terkait kinerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yang dinilai lamban. Adapun faktor penghambat Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Mediasi Dan Publikasi Pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP yaitu : a) Faktor pertama yaitu Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak tersusun menjadi organisasi tersendiri dalam struktur organisaisi yang sepenuhnya menangani aktivitas kehumasan namun terbentuk dalam satuan tugas, dalam hal ini aktivitas kehumasan bukanlah tugas pokok. Hal tersebut mengakibatkan setiap staf memiliki pekerjaan yang terbilang banyak. b)Faktor kedua yaitu kendala dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang berkompetensi, serta kurang menjalin hubungan yang intensif dengan media.

Kata Kunci: Fungsi Humas, Dalam Publikasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna adalah segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi. Skripsi yang berjudul “ *Fungsi Humas Dalam Publikasi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sulawesi Selatan.*” Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga, materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih

kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2012 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita untuk sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini.

7. Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, beserta pihak PT Tirta Sukses Perkasa terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, Agustus 2019

HASLIANI, H

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Humas Pemerintahan.....	8
B. Fungsi Mediator.....	20
C. Fungsi Publisitas.....	23
D. Kerangka Pikir.....	32
E. Fokus Penelitian.....	34
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik analisis Data.....	38
G. Pengabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum hasil penelitian.....	41
B. Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Memediasi Dan Publisitas Pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)Sulawesi Selatan.....	49
C. Faktor yang menghambat fungsi Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas Dalam Mewujudkan Visi BPKP.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan masyarakat sudah dikenal dan dipraktikan sejak berabad-abad yang lalu. Jika kita memahami humas sebagai kegiatan “Penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif”, maka usia humas sebenarnya sudah sangat tua. Kegiatan humas bahkan sudah sama tuanya dengan peradaban manusia. Kita harus menengok ke belakang bahkan sampai masa ribuan tahun yang lalu untuk menemukan asal mulanya. Namun humas sebagai ilmu pengetahuan tersendiri yang dipelajari dan dipraktikan secara serius ternyata masih berusia sangat muda. (Morissan : 2010)

Humas adalah satu kata yang cukup dikenal, apalagi di era globalisasi di mana modernitas mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, interaksi antar sesama disegala kalangan dan lingkungan tidak bisa dihindarkan, kenyataan ini sesuai dengan pemahaman bahwa manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Di era modern ini interaksi antara manusia semakin mengalami perkembangan baik bentuk dan caranya. Namun hakikat dasar dari humas tetap merupakan penghubung atau jembatan dari satu pihak yang diwakili oleh humas itu sendiri dengan pihak lain dalam suatu tatanan sosial masyarakat.(Yulan,:2014) Saat ini tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan humas, dengan demikian humas adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan (profit) maupun perusahaan yang nonkomersial yang tidak mencari keuntungan. Tidak peduli apakah orgnisasi itu berada disektor

pemerintahan maupun swasta. Diakui atau tidak humas saat ini kian banyak dikenal dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam berbagai perusahaan dan instansi yang berkepentingan langsung dengan humas, bahkan saat ini divisi humas dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mesti ada dalam sebuah perusahaan/organisasi guna membangun hubungan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder).

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku ini memiliki visi “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas” (Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih). BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) dalam menjalankan setiap tugas pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara dalam membangun kepercayaan itu melalui keterbukaan informasi (publisitas) kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pengembangan budaya kerja, yang salah satu bidang pengembangannya adalah “Transparansi” seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan pengelolaan kehumasan secara lebih baik dan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah humas berperan penting melalui aktivitas – aktivitasnya. Peran humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan

media komunikasi, baik media online, cetak, iklan, sosialisasi harus ditingkatkan. Pejabat Humas yang semestinya bisa mengoptimalkan pemanfaatan kanal informasi dan harus mampu mengkomunikasikan rencana kinerja, dan capaian kinerja dengan menggunakan media tradisional maupun new media. Tugas dan fungsi kehumasan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) harus di dudukkan sebagai pusat informasi dan komunikasi baik internal dan eksternal yang mendukung pencapaian visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yaitu sebagai auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pentingnya peran kehumasan sebagai jembatan penghubung (mediator) antara BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) dengan *stakeholders* dan masyarakat, membuat Humas mesti lebih aktif membaca kondisi dan situasi terlebih lagi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) merupakan salah satu lembaga yang memiliki *stakeholders* terbanyak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan komunikasi dan informasi tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk menutup-nutupi suatu fakta. Semua dapat mengakses informasi dengan cepat sehingga diperlukan komunikasi yang menciptakan pengertian dan kepercayaan, hal tersebut dapat dilakukan oleh Humas. Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) juga mesti bijak dalam menjalankan peran kehumasan terutama sebagai garda terdepan penyedia informasi karena BPKP berkewajiban untuk menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan informasi yang boleh dan dikecualikan. Salah satu informasi yang

harus disampaikan oleh Humas BPKP kepada masyarakat adalah terkait peran BPKP sebagai konsultan. Masyarakat perlu mengetahui kinerja kontribusi BPKP dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung peran tersebut, Humas BPKP secara terus menerus berkoordinasi dengan Pusinfowas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai penyedia infrastruktur informasi terkait pengawasan serta unit kerja teknis di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Dengan langkah itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Selain itu penting untuk mengelola current issue yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pimpinan di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Namun pada kenyataannya gemas kehumasan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) kurang terdengar, hal itu pula yang melatarbelakangi didakannya rakor nasional BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) dengan tema Forum Kehumasan dan Website BPKP Tahun 2012. Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure Ancol dan diikuti oleh seluruh petugas kehumasan berjumlah kurang lebih 120 orang. Humas BPKP juga terbilang mengemban tugas kehumasan terberat di Indonesia karena merupakan instansi yang memiliki *stakeholders* terbanyak. Tanpa humas BPKP akan sangat sulit mencapai *visinya*. Saat ini telah cukup banyak institusi pemerintah di luar negeri yang telah menempatkan kehumasan pada posisi yang strategis. Untuk itu, beberapa hal yang harus dimiliki insan kehumasan antar lain *softskill*, *networking*, pemahaman atas *stakeholders* dan fungsi BPKP. Salah satu

pembicara dalam rakor nasional BPKP Forum Kehumasan dan Website BPKP Tahun 2012 DR Dewi Aryani, M.Si, Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Duta UI untuk reformasi dan birokrasi menyebut : BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai instansi yang tidak *ngetop* menyayangkan tidak terinformasikannya kinerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) kepada masyarakat. Padahal, peran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sangat strategis dalam *mensupport* terbangunnya *good governance* di Indonesia.

Peran kehumasan sebagai mediator dan publisitas dirasa semakin penting dan strategi untuk mendukung terwujudnya citra positif BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) di masyarakat dan *stakeholders* BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan), terutama beberapa waktu terakhir ini banyaknya pemberitaan di media mengenai keluhan terhadap kinerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yang dinilai lamban. Kemudian pemberitaan dari Tribun Timur Online tanggal 29 April 2018 menyatakan bahwa terkait masalah kebijakan pemerintah kota pare-pare yang ingin menambah jatah beras sejahtera sebanyak 5 kg/ keluarga yang sebelumnya hanya 10 kg menjadi 15 kg/keluarga. Akan tetapi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) dianggap telah melanggar kebijakan tersebut.

Tentunya hal tersebut berdampak kepada opini publik terhadap citra BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Lalu bagaimana humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) menyikapi pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik mengenai BPKP (Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yang tentunya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja BPKP dalam mewujudkan visi BPKP. Dari uraian di atas melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti “*Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Mediasi Dan Publikasi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sulawesi Selatan*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas Humas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) ?
2. Faktor apa yang menghambat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai mediator dan publikasi dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih mendalam tentang Fungsi Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)

- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan publikasi dalam mewujudkan Visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)

D. Kegunaan :

a. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya minat studi Public Relations dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti lebih lagi mengenai aktivitas Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para paraktisi Humas serta dapat dijadikan masukan ataupun usulan bagi BPKP secara khusus dalam menyempurnakan aktivitas Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Humas Pemerintahan

Pada dekade 1970-an peranan Humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan sebagai upaya menjembatani, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan – pesan dari lembaga /organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. Cutlip, Center, dan Brown menyebutkan humas adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya (Cutlip, Center, dan Brown, 2005 : 4). Tahun 1967-1971 disebut dengan periode humas kedinasan pemerintahan, hal tersebut ditandai dengan terbentuknya “Badan Koordinasi Kehumasan (Bako-Humas) Pemerintah” di Indonesia. Pada tahun 1967 didirikan koordinasi antar Humas Departemen/Lembaga Negara yang disingkat Bakor yang secara *ex officio* dipimpin oleh pimpinan pada setiap department.

Penerapan Kehumasan di Instansi Pemerintah dan terbentuknya Bakohumas memperlihatkan bahwa keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya (Ruslan 2008 : 109). Humas dapat merupakan suatu alat atau saluran (*The PR as tools or channels of government publication*) untuk memperlancar jalannya interaksi dan

penyebaran informasi mengenai pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak, atau elektronik hingga menggunakan media tradisional lainnya.

DR.Rex Harlow, The statement of Mexico dan International Public Relations Association (IPRA) di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas salah satunya melakukan fungsi – fungsi “manajemen komunikasi” antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran. Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan, dan membina hubungan baik dengan *stakeholder* atau audiencenya, dengan kata lain membangun identitas dan citra korporat (*building corporate identity and image*). Denny Griswold (Ardianto, 2010 : 12) juga menyebutkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik.

Lahirnya undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengikutsertakan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Rhenald Kasali (Soemirat, 2010 : 15) menyatakan semakin hari masyarakat semakin menuntut adanya kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran. Prinsip ini berkembang sehubungan dengan perubahan nilai – nilai perusahaan di tengah – tengah masyarakat dan perubahan drastis dari teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan masyarakat. Terkait hal

tersebut peranan Humas pada instansi pemerintahan dianggap semakin penting untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari masyarakat luas. Frank Jefkins (Soemirat 2010 : 13) menyatakan bahwa humas melakukan penerangan kepada publik, persuasi, dan upaya menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga. Praktisi Humas di lingkungan pemerintahan khususnya di lingkungan BPKP dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan peran serta fungsinya secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk melakukan hal tersebut, para praktisi humas di lingkungan BPKP, disamping memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip – prinsip batasan moral, budaya, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu tugas dan peran BPKP ke depan dirasa semakin penting untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* sesuai dengan SOP kegiatan kehumasan di lingkungan BPKP. Kasali menyebutkan untuk bertindak secara strategis kegiatan humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasi (Soemirat 2010 :91).

Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu (*back up*) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga yang bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. F. Rachmadi menyebutkan secara struktural, Humas adalah bagian integral dari suatu lembaga/perusahaan, salah satu fungsi yaitu manajemen modern (Soemirat 2010 : 87). Secara garis besar

Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi, atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.

Ruslan (2010 : 343) Fungsi pokok Humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,
2. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara nasional kepada masyarakat,
3. Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan –keinginan publiknya di lain pihak.
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran taktis dalam kehumasan pemerintah/BUMN tersebut, menyangkut beberapa hal yaitu tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan – pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan

komunikasi timbal balik, dan kemampuan memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran /lembaga yang diwakilinya. Ke dua tugas strategis (jangka panjang) Humas, yakni berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), memberikan sumbang saran, gagasan, dan hingga ide – ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.

Jadi pengertian peran ganda Humas instansi pemerintah dan lembaga BUMN tersebut di atas menunjang (*Supporting of PR government activities*) pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kehumasan lembaga bersangkutan. Ruslan (2010 : 345) menyatakan pejabat Humas harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya,
2. Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensnya,
3. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (*opini public*) yang menguntungkan instansi/lembaganya,

4. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapi Humas secara rutin, yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.
2. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi / lembaga maupun berasal dari pihak publiknya,
3. Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.
4. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.
5. Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, *pressrelease*, *newsletter*, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster, dan lain sebagainya.

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan lembaga komersial adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada *public services* atau demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui Humas tersebut,

pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan – tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban - kewajiban pemerintahannya. Menurut John D. Millett (Ruslan, 2010:341) Humas dalam dinas instansi/ lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*)
2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (*advising the public about what is should desire*).
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (*ensuring satisfactory contact between public and government official*).
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (*informing and about what an agency is doing*)

Menurut Dimock dan Koenig (Ruslan, 2010 : 342) pada umumnya tugas – tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut,
2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
3. Kejujuran dalam pelayanan dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional, terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Pedoman Tata Kelola Kehumasan Instansi Pemerintah ini akan menjadi sumber rujukan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi masing-masing.

Visi humas pemerintah kemudian disusun secara lebih detail yaitu terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung

penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut :

1. membangun citra dan reputasi positif pemerintah,
2. membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik,
3. menampung dan mengolah aspirasi masyarakat,
4. mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi,
5. menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah,
6. membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Asas umum humas pemerintah adalah keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, dan integritas tinggi. Dengan model kehumasan Reformasi birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang. Adapun strategi yang dilakukan humas pemerintah dalam menjalankan setiap tugasnya yaitu :

1. pembangun hubungan internal dan eksternal,
2. penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi,
3. penyedia informasi pemerintah,
4. pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa,
5. pendorong upaya pemberdayaan masyarakat,
6. pengelola sarana dan prasarana kehumasan,

7. pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah,
8. pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan segala aktivitas dan peranannya Humas pemerintah merujuk pada prinsip dasar yang meliputi :

1. tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai,
2. tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik,
3. tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (*common practices*) yang sehat,
4. tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan, kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan.

Tugas humas pemerintah pula dijabarkan sebagai berikut :

1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama,
2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik,
3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah,
4. membangun citra dan reputasi positif.

Humas Pemerintah memiliki fungsi yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Dari fungsi humas dapat diketahui peranan – peranan humas yaitu sebagai :

1. Komunikator, Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sarana kehumasan.
2. Fasilitator, Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.
3. Diseminator, Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
4. Katalisator, Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyalurkan kepentingan pemerintah dengan publik.

5. *Konselor, advisor, dan interpreter*. Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah.
6. *Prescriber*, Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku.
2. Secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada kode etik masing-masing organisasi profesi.
3. Sebagai tenaga profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas), serta efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom.

Kode etik humas pemerintah sendiri adalah sebagai berikut:

1. Anggota humas pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah.

2. Anggota humas pemerintahan mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.
3. Anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang positif di masyarakat.
5. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi.
6. Anggota humas pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi humas pemerintahan di Indonesia.
7. Anggota humas pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan/golongan.
8. Anggota humas pemerintahan wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi; mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan

kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan.

9. Anggota humas pemerintahan tunduk, mematuhi, dan menghormati Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
10. Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan Lain-lain

B. Fungsi Mediator

Salah satu fungsi Humas Pemerintah yaitu sebagai mediator. Fungsi mediator terkait langsung dengan masalah hubungan. F. Rachmadi (Soemirat 2010 : 6) mengatakan bahwa masalah hubungan (*relationship*) merupakan hal yang sangat penting. Sehingga sangat penting bagi humas sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya, humas berada di tepi perusahaan dengan kata lain memainkan peran di perbatasan seperti yang dikatakan Grunig dan Hunt (Soemirat, 2010 : 87). Ruslan (2010 : 110) menyatakan fungsi pokok Humas Pemerintah yaitu menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan Hunt menyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang terkandung di dalamnya.

Aktivitas komunikasi berkaitan dengan usaha memelihara komunikasi dua arah atau timbal balik bagi suatu tim kerja sama antar departemen, dan sekelompok orang dalam suatu organisasi (*public internal*) serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dapat dilihat dalam arti luas, seperti interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara perusahaan dan publik untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Komunikasi dua arah timbal balik tersebut merupakan faktor utama dalam manajemen kehumasan, proses tersebut terlihat dari beberapa tahap, antara lain pengorganisasian, pengkomunikasian, pengawasan, dan penilaian. Scott M. Cutlip & Allen H. Center menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja Humas melalui empat proses tahapan atau langkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan (*Research-Listening*), perencanaan dan mengambil keputusan (*Planning Decision*), mengkomunikasikan dan pelaksanaan (*Communication – Action*), dan mengevaluasi (*Evaluation*).

Menurut Lawrence D. Brennan (Ruslan 2010 : XIV) manajemen Humas merupakan system komunikasi (*Management is a communication system*). Peranan komunikasi dua arah sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi mediator. Robert S. Cole juga menyatakan dalam komunikasi dua arah dimulai dengan melakukan proses RACE (fungsi : *Research, Action Planning, Communication, and Evaluation*) hingga bentuk, teknik, serta tujuan komunikasi yang akan dipergunakan. Hal tersebut demi tercapainya saling pengertian,

menghargai, mempercayai, serta toleransi sehingga ada dukungan dari publik dan memperoleh citra positif bagi lembaga yang bersangkutan.

Ruslan (2010 : 14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya. Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Ciri khas dari mediator ini yaitu komunikasi dua arah karena dalam hal ini Humas bertindak sebagai nara sumber informasi (*source of informations*) dan merupakan saluran komunikasi (*channel of information*). Humas sebagai mediator sekaligus komunikator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu.

Peranan Humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagai persuader, sehingga dengan

komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari ke dua belah pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas Humas meliputi membina hubungan ke dalam (*public internal*), yang dimaksud *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal – hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Juga membina hubungan ke luar (*public eksternal*), yang dimaksud *public eksternal* adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, peran Humas bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan ke luar (*outward looking*).

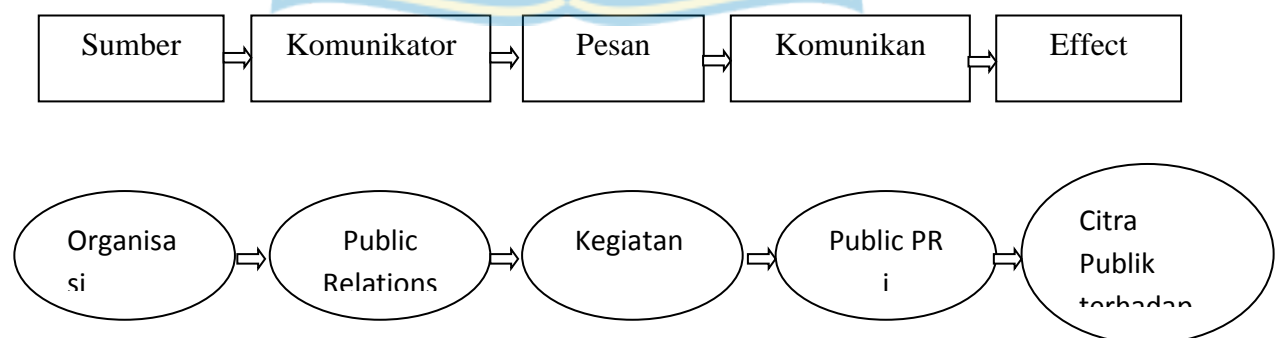
Humas membantu memelihara aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan keluar agar tercapai saling pengertian atau kerja sama antara organisasi dan publiknya. Selain itu Humas berperan melakukan tindakan mulai dari memonitor, merekam, menganalisis, menelaah hingga mengevaluasi setiap reaksi (*feed back*) khususnya dalam upaya penilaian sikap tindak serta mengetahui persepsi masyarakat (*public acceptance or non public acceptance*) sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil dan kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak lembaga/ organisasi.

C. Fungsi Publisitas

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan masyarakat

untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa aspek pendekatan atau strategi Humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*) antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra positif perusahaan di mata publiknya.

Kata komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi (Ruslan 2010 : 81) berasal dari bahasa Latin : *communication* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dengan demikian secara garis besar dalam suatu proses komunikasi terdapat unsur – unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebarnya) dan komunikan (penerima pesan). Soleh Soemirat dan Elvinari Ardianto memperlihatkan model komunikasi dalam Public Relations seperti bagan di bawah ini:



Gambar 2.1

Model Komunikasi dalam Public Relations

Newson dan Siefried (Ruslan 2010 : 82) mengungkapkan pentingnya peranan komunikasi dalam kegiatan Humas terkhusus dalam penyampaian pesan – pesan dalam hal ini informasi demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama dengan publik, khalayak sasaran yaitu seorang pejabat Humas haruslah seseorang yang ahli dalam aspek komunikasi. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa praktisi Humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek teknis komunikasi, atau unsur – unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut :

1. *Source*, yaitu individu atau pejabat Humas yang berinisiatif sebagai sumber untuk menyampaikan pesan – pesannya.
2. *Message*, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu (komunikan).
3. *Channel*, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan – pesan kepada khalayaknya.
4. *Effect*, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan – pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut.

Menurut Robert D. Ross (Ruslan 2010 : 83), bahwa komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi Humas. Publik mengakui dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif,

dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi Humas. Citra positif dapat terbentuk bila publik mempunyai persepsi yang positif terhadap perusahaan. Persepsi ini harus lengkap dan tidak setengah – setengah. Agar hal ini dapat dicapai maka publik harus dalam kondisi kecukupan informasi (*well-informed*) tentang perusahaan. Artinya tidak ada kesenjangan informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Hal itu pula dimaksudkan untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam kegiatan komunikasi (*primary-breakdown of communication*). Ketercukupan informasi akan terwujud bila Humas menyediakan saluran komunikasi yang terbuka (*open communication*) dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik (*two way reciprocal*).

Saluran informasi yang tersedia harus memungkinkan terjadinya proses memberi dan menerima informasi secara berimbang antara kedua pihak. Diharapkan tercipta kondisi saling mengenal antara perusahaan dan publiknya serta tidak ada lagi ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi. Seperti yang dinyatakan Kriyantono (2008 : 23) ruang lingkup pekerjaan Humas salah satunya yaitu publisitas, memperkenalkan perusahaan kepada publik. Misalnya membuat tulisan yang disebar ke media, *press-release*, berita, siaran pers, *newsletters* juga melalui *company profile*, laporan tahunan/annual report, iklan, naskah pidato dan presentasi, artikel, majalah dinding, bulletin, jurnal, publikasi ringan dan website. Humas menghasilkan produk – produk tulisan yang sifatnya

menyebarkan informasi kepada publik, karena itu Humas dituntut menguasai teknik – teknik menulis (*Public Relations Writing*).

Beberapa defenisi publisitas yang dikemukakan para ahli seperti Herbert Baus menyatakan publisitas sebagai pesan yang direncanakan, dieksekusi, dan didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik tanpa membayar pada media. Otis Baskin, dan kawan - kawan mendefinisikan publisitas sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu yang tidak membayar waktu atau space, sedangkan Doug Newson melihat publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial bukan iklan pada medium publikasi atau berita, Kriyantono (2008 : 42).

Dari kaca mata media massa melihat publisitas sebagai informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Media tidak menarik harga untuk menempatkan informasi ini dalam halaman surat kabar atau dalam slot waktu atau radio dan televisi. Karena itu dimuat sepenuhnya hak media massa. Sumber penyampai informasi misalnya Humas perusahaan tidak dapat mengontrol atau menentukan dimuat atau tidaknya suatu informasi. Contoh publisitas di media massa antara lain tentang peningkatan kerja sebuah perusahaan, launching, berita feature, liputan kegiatan, tabloid, dan sebagainya. Publisitas merupakan dampak diketahuinya informasi oleh publik.

Berdasarkan sumber publisitas, publisitas terbagi menjadi dua yaitu publisitas lisan dan publisitas tulisan.

1. Publisitas lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan lisan, misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu peristiwa atau menggelar konferensi pers dengan mengundang wartawan.
2. Publisitas tulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi tertulis yang dibuat Humas, Humas dapat mengirim informasi tertulis ke media dalam bentuk *press-release*, *back-grounders*, *presskitt*, atau *letter of denial*.

Berdasarkan dampaknya, ada publisitas positif dan ada publisitas negatif. Publisitas positif adalah publisitas yang memunculkan dampak positif bagi perusahaan dan publisitas negatif yaitu pemberitaan di media yang mengandung dampak negatif terhadap citra perusahaan. Dan berdasarkan kejadian, publisitas dibedakan menjadi dua yaitu publisitas yang direncanakan dan publisitas yang tidak direncanakan (spontan).

1. Publisitas yang direncanakan yaitu publisitas yang berasal dari kegiatan (event) yang sengaja diselenggarakan oleh Humas kemudian memberitahukannya ke media.
2. Publisitas yang tidak direncanakan yaitu publisitas tentang peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan atau spontan. Kebanyakan publisitas jenis ini bersifat negatif, humas tidak secara sengaja menyampaikan informasi ini kepada media, pada umumnya wartawan mendapat informasi ini menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa sebagai penyebar informasi dengan gratis, namun juga menjadi tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan faktor – faktor dimuat tidaknya informasi

dari Humas, ada dua faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media (*media relations*). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya. Tugas Humas terkait dengan kegiatan menulis yang dikemukakan Cutlip, Center, dan Broom (Kriyantono, 2008 : 27) terkait hal yang dilakukan spesialis Humas di tempat kerja yaitu menulis dan mengedit. Dalam hal ini Humas menyusun rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita feature, *newsletter* untuk karyawan dan *stakeholders eksternal*, korespondensi, pesan website, dan pesan media online lainnya, laporan tahunan, dan *shareholder*, pidato, brosur, film, dan script *slide show*, artikel perdagangan, iklan institusional, materi - materi pendukung teknis lainnya. Mengatur dan mengelola konprensi pers, lomba – lomba, konvensi, *open house*, pemotongan pita, *grand opening*, ulang tahun, mengunjungi tokoh terkemuka, program penghargaan, dan lain – lain.

Selain itu membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni tipografi, fotografi, tata letak, computer desktop publishing, perekaman audio-visual. Juga melakukan riset dengan mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang muncul, iklim politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok kepentingan, dan pandangan – pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasi. Adapun kegiatan publisitas dan media relations antara lain:

1. *Press release* (menulis berita tentang perusahaan kepada media),

2. *Press conference* (menyampaikan informasi tentang perusahaan dengan secara langsung mengundang wartawan)
3. *Press tours* (mengundang wartawan untuk berkunjung ke perusahaan)
4. *Press party* (menjamu wartawan makan bersama)
5. *Press-receptions* (mengadakan acara khusus pertemuan dengan wartawan)
6. *Media Gathering* (mengumpulkan media dalam sebuah forum),
7. *Special Event* seperti *open house* atau *company visit* (memberi peluang kepada public untuk mengenal lebih dekat perusahaan dengan berkunjung langsung ke perusahaan).
8. *Award Ceremonies* (acara pemberian penghargaan)
9. Seminar (mengadakan seminar dengan tema yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baik sebagai penyelenggara atau sebagai pembicara).
10. Newsletter (Media tulisan yang biasa digunakan untuk internal ataupun eksternal public, seperti majalah & bulletin)
11. Speaker bureau (biro khusus juru bicara yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik). Ini adalah system informasi satu pintu (*one door system*). Agar dapat dicegah beragam informasi dari beragam sumber.
12. *Thank you notes and letters* (ucapan – ucapan terima kasih kepada publik)
13. *Audio Visual instrument* (misalnya membuat company profile berbetuk audio visual dan materi presentasi dihadapan publik)
14. *Letters of denial* (surat klarifikasi atas sebuah informasi yang tidak benar yang disampaikan ke media).

15. *Annual Report*

Publisitas yang dilakukan melalui media massa sangat efektif membentuk opini publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik – topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu megandung pembentukan opini. Salah satu kelebihan media cetak atau media elektronik seperti TV swasta komersial adalah efek keserempakan (*stimulatiny effect*) yang luar biasa dalam penyebaran informasinya. Sehingga mampu menciptakan opini publik melalui proses yang relatif singkat, dan menjangkau jumlah yang lebih besar serta tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan.

Dalam fungsi publisitas terlihat bahwa Humas berperan sebagai *Journalist in residence*, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dan mengendalikan berita atau informasinya kepada media massa. Selain itu kegiatan publisitas termasuk di dalamnya yaitu kegiatan dokumentasi dan kliping Ruslan (2010 : 228) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I, kegiatan Humas adalah mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan dan lembaga, aktivitas – aktivitas, dan program acara tertentu, baik bersifat komersial maupun nonkomersial yang telah dimuatatau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas.

Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam Humas merupakan dua kegiatan saling berkaitan erat atau saling menunjang satu sama lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu peristiwa (*event*) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Dokumentasi berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data informasi, dan dokumen tentang suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. Sedangkan *News Clipping* yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita atau karangan, serta foto berita pada event atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah berita, tabloid, dan lain sebagainya yang kemudian dikliping.

Praktisi Humas sebagai *boundary manager* secara profesional dengan memiliki dua kemampuan, sebagai “manajer skill dan tehknikal skill” misalnya melakukan kegiatan menghimpun melalui kliping, menganalisis atau mengevaluasi berita dari berbagai sumber media massa, dan hingga menciptakan media publikasi atau komunikasi organisasi tersebut merupakan kemampuan fungsi teknis PR. Pelaksanaan dua fungsi sekaligus dan penting bagi pihak organisasi, menurut Aldrich & Herker (Ruslan, 2010 : 310) yang pertama adalah proses pengelolaan informasi dalam hal untuk mengelola arus informasi bersifat prioritas, terkini dan akurat mengenai lingkungan organisasi sebelum

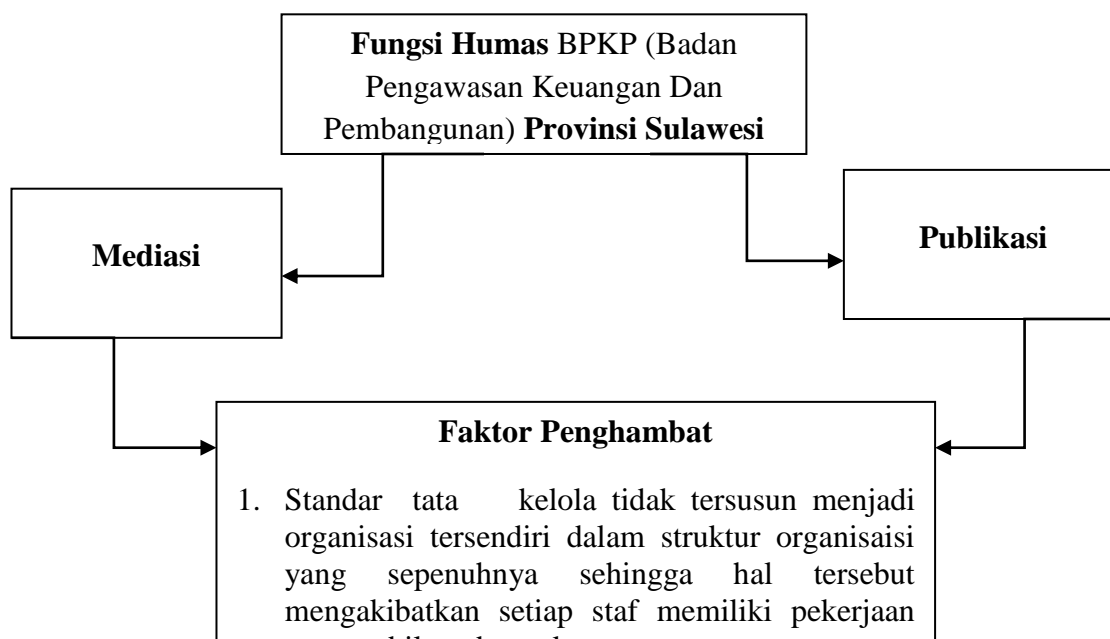
mengambil keputusan, dan kedua adalah fungsi mewakili representasi kepentingan publik eksternal (*eksternal representation*), dengan cermat memperhatikan penerimaan atau penolakan dari kebijakan strategis organisasi yang telah dibuat tersebut, apakah telah sesuai atau tidak dengan aspirasi dan keinginan – keinginan publik sebagai khalayak sarannya.

D. Kerangka Pikir

Dalam melihat fungsi Humas pemerintah dalam kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) kita dapat meninjau dari dua aspek, menurut Ruslan (2010) yaitu dalam mediasi dan publikasi. Langkah yang dapat diambil dalam memediasi yaitu membina hubungan internal dan hubungan eksternal, dan dalam hal publikasi bisa memberikan informasi kepada public baik secara lisan maupun tulisan.

Menjalankan suatu fungsi ataupun peran tentu tak akan terlepas dari factor pendukung maupun factor penghambat, untuk itu kita perlu mengetahui hal tersebut dalam kehumasan BPKP. Dibawah ini ada sedikit gambaran dalam kerangka pikir pada penelitian ini adalah Sebagai Berikut :

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian



Visi BPKP

Bertolak pada masalah penelitian maka focus penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu:

1. Bagaimana aktivitas Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).
2. Faktor apa yang menghambat Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publikasi.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Yang dimaksud fungsi Humas sebagai mediasi adalah menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat)

2. Yang dimaksud fungsi Humas sebagai publikasi adalah mensebarluaskan informasi sebagai sarana sosialisasi kelembagan maupun edukasi baik itu berupa tulisan maupun lisan.
3. Yang dimaksud public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.
4. Yang dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat) atau mereka yang tak mempunyai ikatan fungsional dan structural dalam suatu lembaga.
5. Faktor yang menghambat Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publikasi yaitu: a)Faktor pertama yaitu Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tersusun menjadi organisasi tersendiri dalam struktur organisaisi yang sepenuhnya menangani aktivitas kehumasan namun terbentuk dalam satuan tugas, dalam hal ini aktivitas kehumasan bukanlah tugas pokok. Hal tersebut mengakibatkan setiap staf memiliki pekerjaan yang terbilang banyak. b)Faktor kedua yaitu kendala dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang berkompetensi, serta kurang menjalin hubungan yang intensif dengan media.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 21 Januari sampai 11 Maret 2019. Lokasi penelitian di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Makassar, didasari pertimbangan fungsi Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP belum maksimal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan

memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder, adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*) yakni anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung dan berhubungan dengan aktivitas humas di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat memberikan informasi yang akurat. Penjabarannya sebagai berikut :

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Arman Sahri Harahap	AS	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
2.	Agus Catur Hartanto	AG	Kepala Tata Usaha BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
3.	Anthonyus	A.N	Staf Pengelola Website dan dokumentasi	1 orang
4.	Saifullah Arsyad	S.A	Staf Pengelola Website dan	1 orang

			dokumentasi	
5.	Wahyudi Hatma	W.H	Staf Pelayanan dan Informasi	1 orang
6	Aziz	A.Z	Staf Pelayanan dan Informasi	1 orang
Jumlah Informan				6 orng

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. *Library research* (studi pustaka) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa literatur kepustakaan atau buku –buku yang berkaitan dengan objek masalah.
- b. *Fleld research* (studi lapangan) yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian dengan cara yang dilakukan adalah:
 1. Observasi yakni peneliti mengadakan pengamatan langsung dari objek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan data-data faktual dari objek tersebut. Observasi di lakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Wawancara (Interview guide) kepada setiap informan, dimana dalam pengumpulan data dan informasi dilakukan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan..
 3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan usaha rumah tangga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis yang melihat kondisi dilapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiono, 2012:246) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap komponen tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini: Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa dalam menganalisis data terdapat berbagai cara, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan literatur kepustakaan dan studi lapangan (observasi) sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Reduksi data

Data atau laporan-laporan yang di dapat di lapangan perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian kita.

3. Menyajikan data

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya guna membantu dalam pembelajaran.

4. Penarikan kesimpulan

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Data penelitian yang dikumpul diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau kredibel, oleh karena itu pentingnya dalam melakukan melakukan peabsahan data.

Menurut Sugiyono, (2012) dalam melakukan pengabsahan data dapat ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan masa pengamatan yang dikumpulkan dianggap belum cukup sehingga dilakukan perpanjangan dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali kepada informan/ responden untuk mengumpulkan data sekunder yang di perlukan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara , dan waktu. Dengan demikian triangulasi terbagi sebagai berikut:

- *Triangulasi sumber*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- *Triangulasi tehnik*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.

- *Triangulasi waktu*, waktu juga sering berpengaruh mengenai kredibilitas data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Departemen Keuangan Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan)

dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat preventif. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia.

Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, merupakan unit pelaksana BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011 tanggal 25 Mei 2011. Berdasarkan surat keputusan tersebut dan amanah dari Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapat tugas untuk melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Wilayah kerja Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dengan satu pemerintah provinsi dan 24 pemerintah kabupaten/kota.

Visi BPKP adalah :

"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Sulawesi Selatan".

Misi BPKP:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.
- 2) Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
- 4) Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan dan Keuangan Perwakilan Prov. Sul-Sel

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Perwakilan merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 1 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah daerah.

Tugas Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
- 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
- 5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah;

- 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 7) Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan- badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Evaluasi terhadap pelaksanaan *good governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya.
- 10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
- 11) Melaksanakan administrasi Perwakilan BPKP.

Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan setingkat Eselon II.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan dan Keuangan Perwakilan Prov. Sul-Sel

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor 955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Perwakilan merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 1 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah daerah.

Tugas Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah;
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya.
10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan setingkat Eselon II.

B. Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Memediasi Dan Publisitas Pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Sulawesi Selatan.

Dalam melihat fungsi Humas pemerintah dalam kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) kita dapat meninjau dari dua aspek, menurut Ruslan (2010) yaitu dalam mediasi dan publikasi. Langkah yang dapat diambil dalam memediasi yaitu membina hubungan internal dan hubungan

eksternal, dan dalam hal publikasi bisa memberikan informasi kepada public baik secara lisan maupun tulisan.

1. Fungsi Humas sebagai Mediasi

Merupakan menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan Hunt menyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang terkandung di dalamnya. Sebelum penulis menjabarkan aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP, terlebih dahulu penulis menganalisis sejauh mana peran kehumasan BPKP dalam mendukung pencapaian visi BPKP. Saat ini peranan Humas dalam suatu manajemen sangat strategis untuk menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau instansi. Seperti pula yang dinyatakan oleh kepala Humas BPKP bahwa :

“...Humas sangat mendukung visi BPKP karena Humas mempunyai tanggung jawab dalam menyuarkan fungsi dan peran BPKP kepada masyarakat, terkhusus dalam memperkenalkan bahwa BPKP yang sekarang tidak hanya mengaudit namun juga sebagai konsultan dalam membantu pemerintah menerapkan tata kelolah yang baik di lingkungan pemerintah” (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Fungsi Humas BPKP yaitu menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Perananan Humas yang sangat strategis dikarenakan adanya faktor yaitu meningkatnya proses transmisi dan pertukaran informasi antarunit di dalam organisasi (*internal pull*) dan meningkatnya tekanan dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat partisipasi dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik (*external push*).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa :

“....Peranan Humas sangat besar dalam tercapainya visi & misi BPKP karena Humas merupakan garda terdepan penyedia informasi, melalui aktivitas Humas dalam menjalankan fungsinya, publik dan stakeholder akan mengenal BPKP terkhusus fungsi dan peranan BPKP. Ketika publik dan stakeholders memahami itu tentunya dukungan akan lebih mudah kita dapat dalam pencapaian misi dan visi BPKP”. (hasil wawancara dengan A.C.H , tanggal, 28, Januari ,2019)

Organisasi sebagaimana halnya individu, memiliki cita – cita dan tujuan.

Pada umumnya, tujuan dari suatu organisasi adalah mendapatkan keuntungan/penghargaan, mempunyai arti bagi lingkungan, mendapat dukungan, dihormati oleh masyarakat menyediakan produk yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat, bebas dari keterbatasan dan kebutuhan yang mendesak, dan berpengaruh pada pendapat publik. Perencanaan program kerja Humas mau tidak mau harus dikaitkan dengan cita – cita dan tujuan organisasi di atas misalnya melalui program preventif dan remedial. Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara instansi dengan publiknya, satu kaki berdiri di pihak manajemen dan satu kaki ada di pihak publik. Humas menunjang tujuan instansi dan menjamin kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala humas BPKP kembali menyatakan bahwa :

“....Secara tidak langsung Humas sangat menunjang pencapaian visi BPKP karena dorongan dan kepercayaan masyarakat tentunya akan membuat BPKP lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja BPKP dalam mencapai visi BPKP yaitu menjadi auditor presiden yang responsive, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Dan tentunya hal itu pula berguna bagi masyarakat. Jadi ada keuntungan antara ke dua belah pihak”.(hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23, Januari ,2019)

Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga. Salah satu staf Humas menyatakan :

“...Peranan Humas sangat besar dalam tercapainya visi & misi BPKP karena Humas merupakan garda terdepan penyedia informasi, melalui aktivitas Humas dalam menjalankan fungsinya, publik dan stakeholder akan mengenal BPKP terkhusus fungsi dan peranan BPKP. Ketika publik dan stakeholders memahami itu tentunya dukungan akan lebih mudah kita dapat dalam pencapaian misi dan visi BPKP”. (hasil wawancara dengan S.A, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Organisasi sebagaimana halnya individu, memiliki cita – cita dan tujuan. Pada umumnya, tujuan dari suatu organisasi adalah mendapatkan keuntungan/penghargaan, mempunyai arti bagi lingkungan, mendapat dukungan, dihormati oleh masyarakat menyediakan produk yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat, bebas dari keterbatasan dan kebutuhan yang mendesak, dan berpengaruh pada pendapat publik. Perencanaan program kerja Humas mau tidak mau harus dikaitkan dengan cita – cita dan tujuan organisasi di atas misalnya melalui program preventif dan remedial. Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara instansi dengan publiknya, satu kaki berdiri di pihak manajemen dan satu kaki ada di pihak publik. Humas menunjang tujuan instansi dan menjamin kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala humas BPKP kembali menyatakan :

“....Secara tidak langsung Humas sangat menunjang pencapaian visi BPKP karena dorongan dan kepercayaan masyarakat tentunya akan membuat BPKP lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja BPKP dalam mencapai visi BPKP yaitu menjadi auditor presiden yang responsive, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Dan tentunya hal itu pula berguna bagi masyarakat. Jadi ada keuntungan antara ke dua belah pihak”. (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga. Salah satu staf Humas menyatakan :

“....Peranan kehumasan cukup besar dalam menunjang pencapaian visi BPKP, karena Humas yang menyampaikan informasi ke publik mengenai BPKP, jika informasi yang disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat dan publik bisa menerima dengan baik maka BPKP akan baik di mata masyarakat. Dan bagaimana Humas menyampaikan informasi ke public dengan baik, Humas harus mengemas informasi sedemikian rupa sehingga image BPKP dari masyarakat baik”. (hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Penulis melihat bahwa staf Humas BPKP memahami betul bahwa keberadaan Humas sangat mendukung pencapaian visi BPKP. Aktivitas Humas BPKP berpedoman pada misi kehumasan BPKP yang diatur pada Peraturan BPKP RI tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP antara lain :

- a. Membangun citra dan reputasi positif BPKP
- b. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini publik,
- c. Menampung dan mengelolah aspirasi masyarakat,

- d. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi,
- e. Mensosialisasikan program kerja dan kegiatan BPKP,
- f. Serta membangun kepercayaan publik.

Dari ke enam point di atas, penulis mengklasifikasikan aktivitas Humas menjadi dua point besar yang tercermin dalam fungsi Humas yaitu fungsi mediator dan fungsi publisitas.

Berdasarkan teori Ruslan (2010 : 14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya. Ini berarti aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini telah berjalan dengan baik, hal tersebut dinyatakan oleh kepala Humas BPKP sejauh ini kegiatan sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman yang kita jadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Aktivitas Humas BPKP pun berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Kepala BPKP, Arman Sahri Harahap berpendapat standar tata kelolah kehumasan di kantor ini sudah sangat baik, standar kelolah kehumasan tersebut dibuat merujuk pada pedoman standar tata kelolah kehumasan di instansi pemerintah.

2. Fungsi Humas sebagai Publisitas

Humas dapat menjadi corong informasi dari publik kepada pihak perusahaan, atau sebaliknya mampu bertindak sebagai mediator dari perusahaan dan publiknya. Di samping itu pihak Humas mampu mempertemukan atau

menyampaikan tujuan dan keinginan – keinginan dari pihak publiknya kepada perusahaan atau sebaliknya dari pihak perusahaan terhadap para publinya (bertindak sebagai komunikator dan mediator). Dalam hal ini terlihat kurangnya pengenalan masyarakat akan tugas BPKP. Aktivitas kehumasan dilaksanakan salah satunya untuk meningkatkan citra BPKP.

Humas BPKP sangat selektif dalam menjawab permohonan informasi karena tidak semua informasi dapat dipublikasikan, banyak yang sifatnya rahasia. Sebagai auditor president dalam kalangan pemerintah Humas BPKP sangat berhati – hati dalam menangani informasi baik yang masuk maupun keluar. Namun Humas telah memahami mengenai informasi yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan yang telah diatur dalam aturan kehumasan. Di BPKP ada informasi yang dikecualikan

Untuk lebih mengetahui aktivitas Humas BPKP secara detail, penulis melakukan obeservasi dalam aktivitas kehumasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu staf berujar :

“....Tugas saya sebagai staf Humas yaitu menghimpun semua informasi yang berasal dari media cetak/elektronik yang berhubungan dengan fungsi dan peran BPKP kemudian membuat resume bulanan pemeberitaan yang berhubungan dengan BPKP. (hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Humas BPKP menghimpun setiap berita (*news clipping*) yang kemudian dijadikan bahan analisis untuk menentukan program kerja selanjutnya sekaligus sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan. Selain menghimpun berita sebagai bahan analisis, ada juga yang menangani bagian permintaan informasi. Salah satu staff humas berkata :

“....Yang saya lakukan dalam kehumasan yaitu selain membantu menghimpun berita dari media cetak dan online, saya juga membantu dalam memproses lebih lanjut setiap permintaan informasi sesuai prosedur yang berlaku, dan memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi. Kadang-kadang juga membantu dalam hal pendokumentasian. Ada juga yang menangani bagian website”. (hasil wawancara dengan S.A, tanggal,19,Februari,2019)

Ada juga yang menangani bagian website, Saifullah Arsyad mengatakan aktivitas yang saya lakukan sebagai staf Humas yaitu sebagai pengelola website, juga menangani pendokumentasian dan pembuatan majalah Paraikatte.

Berdasarkan hasil wawacara dengan kepala Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“....Masing – masing staf Humas memiliki tugas masing – masing, begitupun saya. Aktivitas yang saya lakukan sebagai kepala Humas yaitu memimpin Kehumasan BPKP dalam melaksanakan tugas kehumasan dan layanan informasi sehari – hari, mengkoordinasi staf dalam melaksanakan tugasnya, menyusun laporan triwulan, menjadi penghubung guna mendukung kegiatan hubungan antar lembaga, menyusun dan merencanakan agenda kehumasan, menerima dan memproses keberatan dan penolakan pemberian informasi, dan sebagainya”. (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, ada beragam aktivitas yang dilakukan oleh Humas BPKP dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fungsi publisitas. Aktivitas tersebut antara lain resume pemberitaan media massa harian, analisis pemberitaan media massa mingguan, penanganan pemberitaan media massa (klarifikasi, *press conference*, serta *press release*), kunjungan media (*media gathering*), kunjungan media/instansi lain, pameran, *talkshow* dengan nara sumber kepala perwakilan yang dilaksanakan oleh media lokal, dan pengelolaan website serta majalah Paraikatte.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Tata Usaha

Terkait fungsi Humas sebagai publisitas, menyatakan bahwa :

“....Salah satu kegiatan publisitas Humas BPKP yaitu tiap tahunnya ada program Sosialisasi Anti Korupsi, disini BPKP mensosialisasikan cara mengatasi Korupsi kepala kelompok – kelompok masyarakat seperti LSM, pemuka – pemuka agama, mahasiswa sebagai wakil masyarakat. Sekaligus sebagai tempat mensosialisasikan peran dan fungsi BPKP dalam membantu mewujudkan terwujudnya Good Governance di Indonesia secara khusus di Sulawesi Selatan serta membagi brosur kepada peserta yang ada. Dan cukup efektif karena bersentuhan langsung ke masyarakat dan itu akan terukur pada saat sesi tanya jawab sejauh mana mereka ikut serta” (hasil wawancara dengan A.C.H , tanggal, 28, Januari ,2019)

Humas BPKP berkewajiban memasyarakatkan visi BPKP agar diterima atau mendapat dukungan masyarakat. Penulis melihat bahwa publisitas yang ada di kehumasan BPKP sebagian besar merupakan publisitas yang tidak direncanakan/ spontan. Seperti yang diungkapkan salah satu staf humas :

“....Publisitas yang dilakukan tidak langsung dilakukan melalui media seperti iklan dan sebagainya namun lebih terbantu dengan penugasan-penugasan dan sosialisasi ke satu pemda atau instansi vertikal sekaligus mempublikasikan visi dan peran BPKP. Juga kehadiran BPKP dalam persidangan – persidangan korupsi sebagai team ahli yang diliput oleh media terkait peran BPKP sebagai clearing house. Hampir setiap saat ada di koran, jadi publisitasnya tidak secara langsung. Jadi publisitas yang kita lakukan kebanyakan melalui penugasan”.(hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Selain menjalankan fungsi publisitas, Humas BPKP juga menjalankan fungsi mediator. Humas BPKP berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan ke dalam (*internal relations*) maupun hubungan ke luar (*eksternal relations*) untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik

dengan publiknya (*community relations*) dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (*mutual understanding*).

Dalam menjalankan fungsi Humas sebagai mediator, seperti yang dijelaskan sebelumnya BPKP melakukan analisis pemberitaan media massa, penanganan pemberitaan media massa (klarifikasi, *press conference*, serta *press release*), kunjungan media (*media gathering*), kunjungan instansi, pameran, *talkshow* dengan nara sumber kepala perwakilan BPKP yang dilaksanakan oleh media lokal, serta pengelolaan website dan majalah Parai katte. Humas sebagai mediator membantu (*back up*) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga pemerintahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan.

Salah satu staf Humas berujar :

“....Salah satu sarana mediator yang disediakan oleh Humas BPKP seperti sms center/pengaduan web. Untuk menjamin keterbukaan publik melalui sms center terkait tupoksi BPKP bagi mereka yang menerima layanan BPKP dalam hal ini intern pemerintah / birokrat juga surat – surat pengaduan. Respon masyarakat cukup banyak dan beragam tapi sebagian besar berisi pengaduan mengenai hal – hal yang terjadi di instansi pemerintah yang ada di daerah terkait hal – hal yang berhubungan dengan tupoksi BPKP” ”. (hasil wawancara dengan S.A, tanggal,19,Februari,2019)

Selain menyediakan *sms centre* sebagai salah satu sarana pengaduan dan *contact person* resmi yang dapat dihubungi media, humas BPKP juga berupaya menjalin hubungan baik dengan lembaga lain/ *stakeholders* (kepolisian, kejaksaan, Pemda, BUMN/BUMD, dan media). Arman Sahri Harahap, kepala Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkata salah satu cara menjalin

hubungan baik yaitu dengan mengadakan MoU, adanya komunikasi yang intensif dan kerjasama.

Penulis melihat fungsi Humas sebagai mediator sangat diperlukan terkait peran BPKP sebagai auditor, konsultan, dan *clearing house* di kalangan pemerintahan. Baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Kepala BPKP, Arman Sahri Harahap, mengatakan :

“kami selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap stakeholders setiap saat. Apalagi saat ini peranan BPKP sebagai konsultan dan mitra kerja instansi pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara secara transparan dan akuntabel agar pemerintah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jadi fungsi mediator Humas sangat kita prioritaskan.”(hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Dalam menjalankan aktivitas humas BPKP, Humas BPKP kerap kali diperhadapkan pada pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik di media massa misalnya mengenai kinerja BPKP yang dinilai lamban.

Mengenai pemberitaan tentang kinerja BPKP yang dinilai lamban,

Wahyudi Hatma berkata:

“....berbicara mengenai media “bad news is a good news”, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa ditutupi dan pasti akan ada dan itu adalah feedback bagi kami kalau ada bad news seperti itu. Kalau media yang buat badnews dan kita handle itu tidak akan ada habisnya jadi tidak apa-apa terpublish seperti itu tapi jika itu sudah menyangkut nama baik BPKP biasanya kita buat klarifikasi. BPKP tidak hanya mengklarifikasi namun BPKP akan terus membuktikan kinerja dari setiap tugas yang diemban BPKP. Dari sisi intern kita tetap menelaah dan menangani yang perlu ditangani”.(hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Terkait pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik yang muncul di media. Kepala Humas BPKP juga berujar bahwa :

“Mengenai ketakutan akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kami, kami rasa tidak. Kita bekerja secara professional dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan selama ini belum ada gugatan secara langsung terhadap BPKP, disini kurangnya pemahaman masyarakat saja”

Hal senada yang di sampaikan oleh salah satu staf humas

“...Mengenai pemberitaan di media massa sebagian besar itu keluhan mengenai hasil audit untuk penyidik. Sebenarnya tidak lamban cuma masyarakat yang selalu ingin instan, sedangkan proses mengaudit dan merampungkan hasilnya butuh waktu dan proses.” (hasil wawancara dengan A.N, tanggal,19,Februari,2019)

Ini salah satu hal yang mesti disampaikan kehumasan BPKP kepada masyarakat terkait peran BPKP dalam mengaudit. Sehingga masyarakat lebih mengenal BPKP terkhusus dalam melaksanakan tupoksinya sehingga BPKP mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam mewujudkan visi BPKP. Dalam penangan setiap pemberitaan di media yang dirasa keliru dan menyudutkan BPKP, kepala BPKP Arman Sahri Harahap berujar :

“Hal tersebut tergantung pemberitaannya, jika pemberitaan tersebut berbicara mengenai BPKP secara keseluruhan kami mengadakan rapat struktural, jika pemberitaannya mengenai bidang tertentu seperti bidang investigasi yang selalu menjadi makanan empuk wartawan kami akan duduk bersama secara khusus dengan yang ahli dan mengurus masalah tersebut, dan jika pemberitaan itu mengenai pegawai kami minta klarifikasi dari pegawai tersebut, dan pada akhirnya ketika kami telah menemukan kesepakatan untuk suatu kasus atau mengani pemberitaan yang kurang baik kami akan mengirim surat ke media untuk mengklarifikasi.” (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Penulis melihat ada tahapan – tahapan yang dilalui humas BPKP dalam penangan berita negatif media massa atau hal – hal yang dirasa membawa dampak yang negatif terhadap keberadaan dan eksistensi BPKP. Yaitu melalui proses analisis, FGD, dan sampai pada proses klarifikasi. Tidak hanya dalam penangan

media massa, dalam permintaan informasi dan publisitas pun ada tahapan – tahapan yang mesti dilalui. Salah satu staf humas berkata bahwa :

“Setiap permintaan informasi telah direpon dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap permintaan informasi yang masuk tidak serta merta ditindaklanjuti, terlebih dahulu dibicarakan dengan pimpinan karena kita auditor presiden, tidak semua permintaan dapat diterima dan mesti ada surat pengantar dari institusi resmi”. (hasil wawancara dengan A.Z.tanggal 19 febuari 2019)

Humas BPKP sangat selektif dalam menjawab permohonan informasi.

Syarir Samarenda mengatakan bahwa tidak semua informasi dapat dipublish karena banyak yang sifatnya rahasia. Sebagai auditor president dalam kalangan pemerintah Humas BPKP sangat berhati – hati dalam menangani informasi baik yang masuk maupun keluar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Tata Usaha Terkait hal tersebut diatas menyatakan bahwa :

“Proses kerja tidak cukup rumit karena semua staf Humas atau pegawai di kantor ini telah mengetahui aturan mengenai informasi yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan yang sebageian besar informasi tersebut mengenai hasil audit. Setiap informasi yang keluarpun atas persetujuan saya selaku kepala BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.” (hasil wawancara dengan A.C.H , tanggal, 28, Januari ,2019)

Anthonius juga berujar bahwa informasi yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan telah diatur dalam aturan kehumasan. Kalau di BPKP ada informasi yang dikecualikan seperti hasil audit. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diberikan oleh BPKP kepada pengguna informasi seperti Laporan Hasil Pengawasan, Kertas Kerja Pengawasan serta informasi yang terkait dengan pribadi. Hal yang berhubungan dengan masalah keterbukaan informasi publik ini di BPKP telah diatur dengan Keputusan Kepala

BPKP No:KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, sedangkan untuk Daftar Informasi Publik di BPKP juga sudah ada Keputusan Kepala BPKP No:KEP-1227/K/SU/2010. Wahyu Utomo mengatakan tidak semua produk BPKP dapat dipublikasikan terutama yang bersifat rahasia, untuk menjaga reaksi masyarakat dan fungsinya juga untuk tertentu tapi semua itu dengan tanggungjawab bidang investigasi.

Fungsi Humas sebagai publisitas juga terlihat pada saat penulis melakukan penelitian dan saat ini terjadi unjuk rasa di kantor BPKP Sulawesi Selatan terkait penanganan salah satu kasus korupsi. Penulis melihat bagaimana proses yang dilakukan Humas BPKP dalam menangani unjuk rasa masyarakat. Humas memediasi antar pihak pendemo dengan pihak BPKP. Saifullah Arsyad berkata bahwa:

“Apabila ada hal – hal yang menyudutkan nama BPKP pasti akan diindaklanjuti, kita akan membicarakan dan mengklarifikasi masalah tersebut. Contoh lain pada kasus demo, kita mediasi untuk melalukan pembicaraan dalam hal ini kita menampung aspirasi masyarakat kemudian kita juga mengklarifikasi kesalahpahaman. Jadi dari pihak pendemo akan dipersilahkan untuk masuk ruangan dan dipertemukan dengan pihak BPKP entah itu kepala BPKP atau mereka yang bertanggung jawab atas hal yang dikeluhkan sehingga semua dapat dibicarakan dengan baik dan masing – masing pihak merasa puas dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Disitu kita berperan sebagai mediator antara masyarakat dan BPKP.”(hasil wawancara dengan S.A, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Dalam fungsi publisitas terlihat bahwa Humas berperan sebagai *Journalist in residence*, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarkan informasi kepada publik dan mengendalikan berita atau informasinya kepada media massa. Selain itu kegiatan publisitas termasuk di dalamnya yaitu kegiatan dokumentasi dan kliping Ruslan (2010 : 228) seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I, kegiatan Humas adalah mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan dan lembaga, aktivitas – aktivitas, dan program acara tertentu, baik bersifat komersial maupun nonkomersial yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas.

C. Faktor yang menghambat fungsi Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas Dalam Mewujudkan Visi BPKP

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor – faktor yang menghambat aktivitas Humas BPKP sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP. Dari hasil penelitian penulis ternyata ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya. Dan faktor – faktor tersebut merupakan hal – hal yang sangat esensial yang semestinya tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan aktivitas kehumasan.

1. Standar tata kelola

Mendengar pernyataan tersebut, penulis kemudian berusaha meneliti lebih lagi faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan aktivitas kehumasan BPKP. Ada masalah yang muncul ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu pula aktivitas kehumasan BPKP yang tidak terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Salah satu staf Humas, Wahyudi Hatma berkata :

“....Standar tata kelolah kehumasan sudah baik karena itu telah diperbaharui dan disempurnakan, namun kembali ke struktur organisasi yang sedikit rancu dalam artian tidak bekerja maksimal saat dipindahkan dari pusat ke perwakilan, saat di pusat kehumasan terstruktur dalam satu struktur organisasi kerja dan khusus menangani Humas sedangkan di perwakilan Humas terstruktur dalam satuan tugas yang semestinya sudah menjadi satu organisasi tersendiri dalam struktur organisaisi.” ”.(hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kehumasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP adalah kehumasan yang tidak tersusun dalam struktur organisasi kerja namun terbentuk dalam satuan kerja. Aziz berujar :

“Berbicara mengenai apakah semua yang direncanakan telah berjalan sesuai rencana, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa yang meleset, karena itu tadi humas di BPKP Sulsel terbentuk sebagai satuan tugas sehingga teman – teman di sekretariat ada job desk masing – masing sehingga terkadang ada bentrokan antara tugas sehari – hari dengan tugas kehumasan. Tapi sejauh ini masih bisa dicover dengan adanya kerjasama” ”. (hasil wawancara dengan A.Z.tanggal 19 febuari 2019)

Dalam hal ini masing – masing staf memiliki tugas pokok sedangkan tugas kehumasan sendiri merupakan tugas tambahan yang mengakibatkan setiap staf memiliki pekerjaan yang terbilang banyak. Terkait staf yang memiliki banyak pekerjaan Saifullah Arsyad mengatakan :

“Tidak bisa dipungkiri kadang – kadang pekerjaan saya tumpang tindih misalnya ketika ada yang harus dikerjakan diluar dari kehumasan tiba – tiba ada informasi yang mesti disampaikan secepatnya, kadang bingung namun kembali melihat mana yang menjadi prioritas” ”. (hasil wawancara dengan S.A, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Terlihat bahwa kadang – kadang pekerjaan pokok dan kerja kehumasan yang dilakukan staf Humas tersebut tumpang tindih. Kegiatan Humas tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah atau hanya kerja sambilan, tetapi harus dikelola secara

profesional dan serius dengan penuh konsentrasi, karena berkaitan dengan kemampuan Humas dalam manajemen teknis dan sebagai keterampilan manajerial agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang direncanakan.

Wahyudi Hatma kembali berujar :

“....Kerja kehumasan tidak menjadi keseharian namun hanya lebih kepada pemenuhan tanggung jawab dalam hal ini pembuatan laporan kehumasan. Hal itu mungkin dikarenakan kehumasan hanya dianggap sebagai kegiatan pendukung dan bukan sebagai kegiatan inti. Kelemahan utamanya di BPKP Sulsel bahwa Humas seolah - olah hanya sebagai tempelan meskipun ada uraian tugas namun hanya sambilan. “Humas hanya sebatas memenuhi kebutuhan laporan” Bagaimana laporan bisa terjaga, tepat waktu, tepat isi, dan tepat guna” ”.(hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Penulis melihat faktor pertama yang menjadi kendala aktivitas Humas BPKP sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP yaitu kehumasan yang tidak terstruktur dalam suatu struktur organisasi kerja namun menjadi satuan tugas membuat staf Humas berkerja cukup keras. Kepala Humas BPKP arman sahri harahap juga berujar :

“Hambatan tidak terlalu signifikan, susahnya adalah ketika anggota satgas Humas harus menjalankan tugas ke luar kota, namun sejauh ini kita tetap berusaha untuk menangani hal tersebut. Intinya adalah kerjasama, bagaimanapun kegiatan humas akan tetap berjalan. Dalam hal ini anggota Humas harus jeli melihat situasi dan kondisi. .” (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Namun sejauh ini para staf Humas sudah berusaha secara maksimal dengan adanya kerja sama dan komitmen dari semua pihak. Anthonius berujar :

“Secara pribadi apa yang diamanahkan kepada saya akan saya lakukan dengan baik karena itu sebagai kehormatan bagi saya untuk menangani sesuatu. Dalam kehumasan saya sebagai pengelola website, dan membantu menghandle kegiatan pendokumentasian, berita, dan majalah.” ” (hasil wawancara dengan A.N, tanggal,19,Februari,2019)

Untuk menangani kendala yang pertama Humas BPKP Sulawesi Selatan telah berusaha secara maksimal dan sangat terbantu dengan pimpinan yang selalu berkoordinasi dengan staf Humas. Meskipun staf Humas terbentuk dalam satuan kerja dan secara struktural tidak berada langsung di bawah top management namun koordinasi antar pimpinan dan staf Humas BPKP tidak pernah putus. Itu terlihat dari kepala BPKP Hamonangan Sinarmata yang selalu memantau pekerjaan Humas dengan mengunjungi bagian Humas dan selalu menyempatkan waktu untuk berbincang – bincang dengan staf Humas. Salah satu hal yang hampir setiap saat dilakukan oleh kepala BPKP Hamonangan Sinarmata adalah ikut dalam proses analisis harian pemberitaan di media massa.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain kendala struktur organisasi, Humas juga menemui kendala dalam hal kompetensi sumber daya manusianya. Karena staf Humas yang ada di BPKP tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Aziz berujar semua staf memang bukan berbasik humas rata – rata semua belajar secara otodidak. Hampir semua staf Humas belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literatur, forum kehumasan, dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan. Hal itu juga disebabkan penunjukan anggota staf Humas yang tidak terlalu memperhatikan kompetensi seseorang.

Wahyudi Hatma berujar :

“....Karena bentuknya Satgas lintas sektor siapapun bisa masuk ke situ menangani yang mengakibatkan task force setiap tahun harus diupdate. Proses updating ini berpengaruh ke penunjukan personil yang berubah – ubah. Kebebasan ini yang kemudian mengakibatkan seseorang yang ditunjuk belum tentu dapat melakukan tugas kehumasan yang

diembankan secara maksimal” ”.(hasil wawancara dengan W.H, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf Humas mendapat banyak tantangan. Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan fungsi Humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar menurut Humas BPKP yaitu mengenai prinsip – prinsip pengolahan data dan informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang disampaikan. Saifullah Arsyad berpendapat :

“...Yang menjadi tantangan bagi saya yaitu harus siap mengupdate setiap informasi baik yang dari luar juga yang akan dipublikasikan. Humas terkadang hanya terlihat saat ada kegiatan, misalnya dalam pembublikasian berita. Berita akan terpublish hanya jika ada kegiatan selebihnya tidak. Ada juga berita yang lambat diterbitkan waktu mengupload berita dengan kegiatan rentang waktunya telah jauh, jadi kurang efektif. Sedangkan masyarakat selalu menginginkan informasi yang uptodate”. (hasil wawancara dengan S.A, tanggal, 18 ,Februari,2019)

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Humas BPKP arman sahiri harahap

“Humas mesti update akan informasi baik itu berita dari keluar maupun berita yang masuk. Banyaknya informasi yang tidak uptodate misalnya lambatnya laporan keuangan, lakip, dan sebagainya. Juga memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin seperti video publicity yang terdapat pada bagian depan kantor” .” (hasil wawancara dengan A.S.H, tanggal,23,Januari ,2019)

Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan pengujian kemampuan praktisi Humas baik segi kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen Humas dan manajemen komunikasi pada sebuah organisasi/perusahaan yang maju dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, atau kompetisi kian tajam pada

informasi era terbuka. Pula dalam teknik produksi media Humas dan publisitas korporat seperti menguasai berbagai teknik dan kemampuan dasar dalam menulis naskah kehumasan (*PR Writing Skill*) seperti pembuatan *press release* atau *news release* yang mengandung unsur nilai berita (*news value*) yang tinggi dan layak untuk disiarkan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan, terkait Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Mediasi Dan Publikasi Pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan aktivitas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediasi dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari publisitas yang belum efektif, kurangnya pengenalan masyarakat akan keberadaan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi serta banyaknya pemberitaan di media massa terkait kinerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yang dinilai lamban.
2. Adapun faktor yang penghambat Fungsi Humas Pemerintahan Dalam Mediasi Dan Publikasi Pada Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) yaitu :
 - a) Faktor pertama yaitu Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tersusun menjadi organisasi tersendiri dalam struktur organisasi yang sepenuhnya

menangani aktivitas kehumasan namun terbentuk dalam satuan tugas, dalam hal ini aktivitas kehumasan bukanlah tugas pokok. Hal tersebut mengakibatkan setiap staf memiliki pekerjaan yang terbilang banyak.

- b) Faktor kedua yaitu kendala dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang berkompetensi, serta kurang menjalin hubungan yang intensif dengan media.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, serta manajemen komunikasi krisis dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
- b) Menjalinkan hubungan yang lebih intensif dengan media sebagai mitra Humas dalam hal publisitas dalam membentuk opini publik serta meningkatkan pelayanan terkait fungsi publisitas dan mediator misalnya dalam merespon permintaan, menanggapi pengaduan, teknik produksi

media humas, dan memaksimalkan media – media publisitas yang telah ada misalnya majalah paraikatte, video publicity, dan website.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Linggar. 2001. *Teori & Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, Barhan & Rachmat Kriyanto. 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Cutlip, M. Scoot, dkk. 2009. *Effective public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Onong Uchyana. 2009. (a). *Human Relation & Public Relation*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2009. (b) *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Felber, Terry. 2002. *Kiat Praktik Komunikasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Kriyantono, Rachmad. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kurnia, Ahmad. 2010. *Peran Dan Fungsi Profesional Public Relations Dalam Organisasi*. <http://manajemenkomunikasi.blogspot.com>. Diakses pada 13 Februari 2016.
- Kusumastuti, Frida. 2004. *Dasar - Dasar Humas, Bogor Selatan*: Ghalia Indonesia.
- Morissan, 2010. *Manajemen Public Relation, Strategi menjadi Humas Profesional* Jakarta: Kencana.
- Moore, Frazier. 2004. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Human Communication: Prinsip - Prinsip Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rumanti, Maria Assumpta. 2002. *Dasar - dasar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Grasindo

- Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan. Konsepsi & Aplikasi* .Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- , 2008 . *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta:Rajawali Pers.
- . 2010. *Manajemen. Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2004. *Dasar - dasar Public Relations*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudartama, Enaliya. 2013. *Peran Manajemen Public Relation*. <http://belajarkomunika.silagi.blogspot.com>. Diakses pada 10 Februari 2015.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sylvia Moss, dan Stewart L Tubbs. 2008. *Human Communication*. Bandung:Rosda karya.
- Thomas, Colin Coulson. 2005. *Pedoman Praktis untuk PR*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, 2008. *Komunikasi. Komunikasi & Hubungan Masyarakat*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Yulan. 2016. *Hubungan Masyarakat Pemerintah 2014*. <https://mugiwararmmas.wordpress.com/2011/05/31/humas-pemerintah-or-government-public-relations>. (diakses pada 20 Februari 2017)



Gambar 1. 1 Kepala Perwakilan BPKP Sulsel



Gambar 1. 2



Gambar 1. 3

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan skripsi yang berjudul FUNGSI HUMAS DALAM PUBLIKASI PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN, Nama Lengkap Hasliani.H anak tunggal dari pasangan Hasanuddin dan Halijah lahir di Ujung Pandang 30 Desember 1987. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN Tamamaung Makassar lulus pada Tahun 2000 dan di Tahun itu pula penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 13 Makassar dan lulus pada Tahun 2003 dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Taman Siswa Makassar dan lulus pada Tahun 2006 kemudian pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) pada Program Strata Satu (S1).